

**ANALISIS KAPASITAS SUMBER-SUMBER KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI
WILAYAH JAWA TENGAH**

Wahyu Kresna Aji, Kismartini

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http: www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai macam dampak atau konsekuensi yang harus ada dari adanya kebijakan tersebut. Salah satu hal penting dan menarik yang terkena dampaknya adalah adanya penarikan urusan atau kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam hal pengawasan dan pengendalian angkutan muatan melalui Permenhub Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sumber-sumber kebijakan dan menganalisis dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan pasca penarikan kewenangan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kapasitas sumber-sumber kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jawa Tengah belum sepenuhnya terpenuhi dan siap untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi diantaranya, masih kurangnya kapasitas staf atau personil pelaksana, kapasitas informasi yang belum optimal, dan kapasitas kelengkapan fasilitas prasarana yang masih belum memadai. Hanya terdapat satu indikator yang sudah terpenuhi dengan baik yaitu kapasitas wewenang. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari kebijakan penarikan kewenangan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jawa Tengah meliputi dampak individual personil pelaksana, dampak organisasional, dan dampak pada sasaran kebijakan serta sistem sosial. Saran dari penelitian ini adalah mengharapkan *stakeholders* terkait untuk segera meningkatkan kondisi kapasitas sumber-sumber kebijakan yang masih belum memadai dan memperhatikan dampak negatif dari kebijakan penimbangan kendaraan di Jawa Tengah.

Kata kunci: Kapasitas, Sumber-Sumber Kebijakan, Kebijakan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

**ANALYSIS CAPACITY OF POLICY RESOURCES FOR THE
IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLES WEIGHING IN CENTRAL
JAVA**

ABSTRACT

The enactment of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government has provided various kinds of impacts or consequences that must be had from the existence of this policy. One of the important and interesting things affected is the withdrawal of regional government affairs or authority by the central government, namely in terms of supervision and control of cargo transport on the road through Minister of Transportation No. 134 of 2015 concerning the Implementation of Motor Vehicle Weighing on Roads. The purpose of this study was to determine the condition of the sources of policy and analyze the impact resulting from the policy after the withdrawal of authority to carry out the weighing of motor vehicles in Central Java. This research is a type of qualitative research, with a descriptive approach. The results of this study indicate that the capacity of policy sources for the implementation of motor vehicles weighing in Central Java has not been fully fulfilled and that is not ready to support the implementation of policies. This can be seen from several indications, including the lack of capacity of staff or implementing personnel, information capacity which not optimal, and the capacity of infrastructure facilities that are still inadequate. There is only one indicator that has been fulfilled well, namely the capacity of authority. While the impact resulting from the policy of withdrawing the authority to carry out the weighing of motorized vehicles in Central Java includes the individual impacts of implementing personnel, organizational impacts, and the impact on policy objects and the social system. The recommendation from this research is to expect related stakeholders to immediately improve the condition of the capacity of policy resources that are still inadequate and pay attention to the negative impact of the vehicle weighing policy in Central Java

Keywords: Analysis, Policy Sources, Motor Vehicle Weighing Implementation Policy.

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai macam dampak atau konsekuensi yang harus ada dari adanya kebijakan tersebut. Salah satu hal penting dan menarik yang banyak mengalami perubahan adalah menyangkut tentang pembagian urusan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dalam hal pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang di jalan melalui Permenhub Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sejak 1 Januari 2017, pengelolaan UPPKB (Unit Pengelola Penimbangan Kendaraan Bermotor) beralih dari Pemerintah Daerah yakni Dinas Perhubungan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Perpindahan kewenangan pengelolaan UPPKB atau jembatan timbang yang sekarang dikelola oleh Kementerian Perhubungan ini tidak serta merta lancar ataupun tanpa masalah. Banyak masalah yang muncul dengan adanya transisi perpindahan kewenangan ini. Seperti halnya yang dialami oleh UPPKB di wilayah Jawa Tengah.

Pertama, tentang permasalahan dalam awal proses perpindahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pada lembaga terkait yang terkena dampak adanya Permenhub Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Terhitung mulai tahun 2017 ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah akan dialihkan ke pemprov dan kementerian.

Kedua, tentang capaian kuantitas jalan nasional yang mengalami penurunan pada tahun 2015 bertepatan setelah Permenhub Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan

Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan diberlakukan.

Presentase Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2012-2016



Sumber: Pusdata Kementerian Pekerjaan Umum

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2012 sampai tahun 2014, presentase capaian kemantapan jalan nasional mengalami peningkatan yang stabil, akan tetapi presentase capaian kemantapan jalan mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sebesar 4,5 %. Adanya penurunan tersebut salah satunya disebabkan karena ditutupnya sebagian besar UPPKB yang ada di seluruh Indonesia.

Ketiga, tentang masih tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas dan kendaraan angkutan jalan selama periode tahun 2010-2016. Berdasarkan database Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT) pada tahun 2010 sampai 2016 menunjukkan bahwa 68,29% terjadi tabrakan antar angkutan jalan, 26,83% terguling, 4,88% terbakar.

Sementara faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia berdasarkan database KNKT disebabkan oleh tiga faktor yaitu, 69,70% karena manusia atau SDM, 21,21% karena sarana, 9,09% karena prasarana. Berdasarkan data tersebut pada rentang tahun 2010-2016 penyebab kecelakaan lalu lintas angkutan jalan di Indonesia tentang sarana dan prasarana masih tinggi. Salah satu indikasinya adalah mengenai tentang angka kerusakan jalan. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah faktor manusia yang mendominasi sehingga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sifat dari para pengguna atau pemilik kendaraan angkutan jalan.

Kasus terbaru yang terjadi pada tanggal 18 April 2018 dimana Jembatan Cincin Lama yang menghubungkan Kecamatan Babat, Lamongan dengan Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur

ambrol tidak kuat menahan beban tonase dari angkutan muatan yang melebihi kapasitas muatan. Kelebihan tonase tersebut diakibatkan karena tidak beroperasinya sejumlah UPPKB atau Jembatan Timbang Baureno yang berada pada wilayah tersebut sebagai efek dari perpindahan kewenangan.

Kempat, tentang sumber-sumber kebijakan berupa fasilitas sarana dan prasarana yang dianggap masih belum layak dalam implementasi kebijakan tersebut. Terbengkalainya beberapa UPPKB yang ada di seluruh Indonesia karena belum semua UPPKB dioperasikan kembali adalah buktinya.

Kadaan UPPKB di Kabupaten Semarang Tahun 2016



Sumber: *Tribun Jateng Tahun 2016*

Kelima tentang kejelasan informasi. Sumber informasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ini dirasa masih kurang pada masa awal implementasinya.

Hal tersebutlah yang menyebabkan perlu adanya studi terkait dengan bagaimana kondisi kapasitas sumber-sumber kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pasca kebijakan penarikan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong(2010:10-13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan menggali fakta yang ada sebanyak-banyaknya dan menjelaskannya dengan pemahaman yang tepat dan jelas. Metode analisis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh

dengan mengolahnya menjadi informasi yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan objek atau subjek penelitian. Dimana data yang diperoleh nantinya meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis kapasitas sumber-sumber kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan pada UPPKB di Provinsi Jawa Tengah dan Menganalisis dampak kebijakan penarikan kewenangan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di wilayah Jawa Tengah terhadap unit-unit sosial terdampak. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* dan didukung juga dengan teknik *snowball sampling*. Sumber data terdiri dari data primer berupa interview dan observasi. Sedangkan data sekunder berupa jurnal, media masa dan regulasi.

KAJIAN TEORI

Menurut George C. Edward (Dwiyanto, 2017:31), terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber-sumber kebijakan, disposisi, dan struktur organisasi. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.

Salah satu variabel yang berperan penting untuk mendukung tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan adalah sumber-sumber kebijakan. Menurut George C. Edward (Dwiyanto, 2017:31), Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi menjadi tidak efektif dan berjalan baik. Dengan demikian sumber-sumber menjadi faktor yang penting dalam sebuah

implementasi kebijakan publik. Sumber-sumber kebijakan publik ini meliputi:

a) Staf, merupakan salah satu variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Staf dapat digolongkan menjadi dua yakni terkait dengan kuantitas dan kualitas yang dimilikinya

b) Informasi, meliputi tentang cara bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, data tentang ketaatan aktor-aktor pelaksana terhadap suatu kebijakan yang dijalankan.

c) Wewenang, untuk dapat menjalankan suatu kebijakan dengan baik, maka diperlukan adanya kewenangan yang efektif dari aktor pemangku kepentingan.

d) Fasilitas, mencakup sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung atau menunjang jalannya suatu implementasi kebijakan.

Menurut Sahya Anggara (2014:282), Dalam sebuah kebijakan/program dapat membawa dampak pada berbagai unit sosial, antara lain sebagai berikut:

1) Dampak individual: biologis (penyakit, cacat fisik), psikologis

(stress, depresi, emosi), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah), ekonomis (naik turunnya penghasilan, harga, keuntungan), sosial serta personal.

2) Dampak organisasional: langsung (terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi), tidak langsung (peningkatan semangat kerja, disiplin)

3) Dampak pada masyarakat (meningkatnya kesejahteraan) dan Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat, menguatnya solidaritas sosial).

PEMBAHASAN

A. Kapasitas Sumber-Sumber Kebijakan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber-sumber kebijakan yang dapat mempengaruhi tahap pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari:

1. Kapasitas Staf atau Personil Pelaksana

a). Kuantitas Staf

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dapat diketahui bahwa kuantitas atau jumlah personil yang ada sangat jauh dari kata cukup. Standar jumlah total personil yang ditetapkan pada setiap UPPKB di Jawa Tengah adalah 840 orang.

Pada kondisi nyata di lapangan, jumlah total personil pelaksana yang menangani kegiatan penimbangan di UPPKB Wilayah Jawa Tengah saat ini hanya berjumlah 250 orang. Jumlah tersebut ditempatkan pada 14 UPPKB yang ada di Jawa Tengah, lebih tepatnya dioptimalkan pada 7 UPPKB yang sudah beroperasi kembali.

BPTD Wilayah X yang menaungi personil pelaksana di Wilayah Jawa Tengah belum mengambil tindakan terkait masalah kurangnya kapasitas jumlah personil tersebut. BPTD Wilayah X hanya akan terus mengoptimalkan jumlah personil yang ada sampai adanya kebijakan lebih

lanjut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

b). Proses Perpindahan Status Staf

Untuk saat ini pelaksanaan proses perpindahan status personil pelaksana telah diselesaikan dan ditata ulang semuanya. Berdasarkan hasil wawancara, sempat terdapat penolakan untuk berpindah status oleh beberapa personil. Penolakan tersebut terjadi karena beberapa personil khawatir jika saat dipindah tugaskan nantinya akan berada jauh dari tempat tinggal atau domisili mereka.

c). Kualitas Staf

Kualitas atau kompetensi dari staf sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, akan tetapi yang masih menjadi masalah adalah dalam hal persebaran kompetensi yang belum merata.

d). Kapasitas Pengawasan Staf

Pengawasan staf sudah diatur dengan jelas. Sistem alur pelaporan yang dilaksanakan sudah sistematis dan berjenjang, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah masih adanya celah dalam hal pemberian sanksinya. Sanksi yang diberikan pada pelanggaran berat

dirasa masih terlalu ringan karena akan berpotensi menurunkan integritas dari organisasi badan pelaksana

2. Kapasitas Informasi

Kapasitas informasi yang harus dipenuhi untuk dapat mendukung tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan, diantaranya adalah tentang kapasitas informasi SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) dan kapasitas petunjuk teknis atau SOP (*Standart Operating Procedures*).

a). SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja)

Informasi mengenai SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja) kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Wilayah Jawa Tengah sudah dijelaskan secara terperinci melalui 3 peraturan.

b). SOP (*Standart Operating Procedures*)

Petunjuk teknis atau SOP telah diatur dengan jelas di dalam Perdirhubdat Nomor SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Terdapat kurang lebih 13 jenis SOP yang diberlakukan dalam kegiatan penimbangan, akan tetapi secara mengejutkan terdapat adanya keberatan dari personil pelaksana di UPPKB terkait banyaknya SOP yang ada. Dapat dikatakan bahwa terjadi dilema di dalam diri para personil pelaksana di UPPKB untuk bersikap dan menjalankan tugasnya.

3. Kapasitas Wewenang

Kapasitas kejelasan wewenang dalam kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Wilayah Jawa Tengah dapat dilihat dari batasan-batasan wewenang dan garis pembagian wewenang yang ada.

a). Batasan Wewenang

Kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor sejauh ini telah memiliki tiga unsur dari empat unsur batasan wewenang internal yang ada yaitu SOP, deskripsi tiap jabatan, Anggaran, sedangkan yang tidak ada adalah AD/ART. Batasan

wewenang eksternal terdiri dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan organisasi pelaksana dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk unsur batasan wewenang eksternal tersebut, kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Wilayah Jawa Tengah sudah memiliki keduanya.

b). Garis Pembagian Wewenang

Garis pembagian wewenang dalam kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor sudah jelas dan terstruktur dari tingkat atas pada Kementerian Perhubungan sampai dengan unit terkecil yakni pada Satuan Pelayanan UPPKB dan semua tugas dan *jobdesk* sudah dibagi habis.

4. Kapasitas Fasilitas Sarana dan Prasarana

Kapasitas fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan diantaranya:

a). Kapasitas Jumlah UPPKB

Kapasitas jumlah UPPKB yang beroperasi di Wilayah Jawa Tengah masih kurang. Pasca penarikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat, jumlah UPPKB yang sudah dioperasikan kembali berjumlah 7 dari jumlah total 14 UPPKB yang tersebar di beberapa kota/kabupaten di Wilayah Jawa Tengah. Bila dicermati, lokasi dari 7 UPPKB yang sudah beroperasi tersebut masih belum merata tersebar di semua jalur yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Persebaran titik lokasi UPPKB yang beroperasi sementara lebih banyak dipusatkan pada jalur pantura.

b). Kapasitas Standar Kelengkapan Fasilitas UPPKB

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, standar kelengkapan fasilitas setiap UPPKB di Wilayah Jawa Tengah belum sepenuhnya lengkap dan merata. Setiap UPPKB paling tidak memiliki satu sampai empat atau bahkan lebih kekurangan dalam hal fasilitas, kecuali pada 2 UPPKB yang dijadikan percontohan di Jawa Tengah yakni UPPKB Wanareja Cilacap dan UPPKB

Subah Batang. Melihat kondisi yang ada tersebut pemerintah pusat mengusung 5 konsep dalam peningkatan fasilitas prasarana di UPPKB diantaranya konsep transparan, bersih dan rapi, terang-benderang, informatif, serta keselamatan.

Dibalik terselenggaranya 5 konsep peningkatan fasilitas prasarana diatas, terdapat satu masalah yang cukup penting dalam seluruh UPPKB di Wilayah Jawa Tengah. Masalah tersebut terletak pada kapasitas luas UPPKB. Kapasitas standar luas yang harus disediakan untuk UPPKB paling tidak seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi. Sedangkan rata-rata UPPKB di Wilayah Jawa Tengah tidak ada yang seluas itu.

c). Kapasitas SIM (Sistem Informasi Manajemen) UPPKB

Kapasitas Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah menjadi sorotan dari Pemerintah Pusat dalam peningkatan pelayanan dari UPPKB. Pemerintah Pusat dirasa terlalu berambisi dengan rencana pembangunan Sistem Informasi

Manajemen (SIM) yang canggih tanpa lebih dulu memperhatikan kondisi UPPKB yang ada di lapangan.

Pembangunan SIM yang dilakukan masih terasa serampangan dan tidak terencana dengan baik, hal tersebut terbukti dari keterlambatan jadwal pemasangan fasilitas pendukung penerapan sistem *E-Tilang* di beberapa UPPKB di Wilayah Jawa Tengah.

B. Dampak Kebijakan Penarikan Kewenangan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Terhadap Unit-Unit Sosial Terdampak

1. Dampak Individual Para Pelaksana

Pada implementasinya di lapangan, penataan ulang formasi personil mengakibatkan kebanyakan para personil pelaksana ditempatkan pada tempat kerja yang jauh dari domisili atau tempat tinggalnya.

Dampak lain yang dirasakan adalah dalam hal kesejahteraan personil. Para personil yang berstatus sebagai PPNPN penjaga asset UPPKB

mendapatkan gaji yang lebih kecil dari sebelumnya ketika mereka masih menjadi pegawai dari pemerintah provinsi.

2. Dampak Organisasional

Dampak pertama yang dihasilkan adalah munculnya SOTK baru yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan penimbangan kendaraan bermotor pada wilayah tertentu. Adanya sebuah SOTK yang baru tersebut menjanjikan sebuah perbaikan pelayanan dan UPPKB tidak dimanfaatkan kembali sebagai lahan bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan daerah.

Perlu diperhatikan juga bahwa kebijakan penarikan kewenangan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor juga harus dibayar mahal. Beberapa aset berada dalam kondisi rusak akibat sudah lama tidak digunakan. Beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan adalah alat yang berhubungan dengan kelistrikan dan

sistem komputer, dan jalan di area UPPKB.

3. Dampak Pada Sasaran Kebijakan dan Sistem Sosial

Kebijakan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Wilayah Jawa Tengah sementara ini belum bisa untuk membuat suatu bentuk sistem sosial baru dimana para kelompok sasaran kebijakan paham dan sadar akan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dampak yang diharapkan dari sasaran kebijakan dalam hal ini para pengemudi belum dapat dikatakan optimal karena dalam kenyataan pelaksanaan di lapangan masih terdapat konflik antara personil pelaksana UPPKB dan pengemudi angkutan muatan. Masih adanya konflik yang terjadi tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dari para pengemudi angkutan muatan belum sepenuhnya ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kapasitas Sumber-Sumber Kebijakan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

a). Kapasitas Staf

Dapat diketahui bahwa kuantitas staf atau petugas pelaksana kurang memadai dan persebarannya belum merata, kualitas staf atau petugas pelaksana sudah sesuai dengan kompetensi yang ada, proses perpindahan status staf sudah dilakukan dan ditata ulang, akan tetapi sempat terjadi dinamika permasalahan pada awal implementasinya, dan pengawasan Staf sudah dilakukan dengan baik, akan tetapi masih terdapat celah dalam hal mekanisme pemberian sanksinya.

b). Kapasitas Informasi

Kondisi kapasitas informasi dapat disimpulkan bahwa SOTK dari program kebijakan sudah disusun secara jelas dan terperinci dalam landasan hukum yang ada, Informasi mengenai petunjuk teknis juga sudah jelas dan terperinci, akan tetapi penerapan SOP di lapangan masih terasa rumit dan menghambat pelaksanaan penimbangan, Terjadi

dilema dalam penerapan SOP di lapangan, karena dirasa SOP masih belum relevan dengan kondisi yang ada di lapangan secara langsung

c). Kapasitas Wewenang

Kondisi kapasitas wewenang sudah terdapat batasan wewenang yang jelas, baik itu batasan wewenang internal ataupun eksternal dan intensitas urusan, pembagian habis tugas, rentang kendali/garis komando sudah ada dan sesuai dengan berbagai landasan hukum yang mengaturnya

d). Kapasitas Fasilitas Sarana dan Prasarana

Ketersediaan atau kuantitas UPPKB belum memadai, kelayakan sarana dan prasarana penunjang kebijakan (UPPKB) belum sepenuhnya memadai, terdapat masalah yang cukup krusial yaitu dalam hal standar kapasitas luas UPPKB, kapasitas SIM belum memadai, Pemerintah terkesan serampangan dan tanpa diikuti perencanaan yang matang dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, SIM yang diterapkan sampai saat ini

hanya sebatas E-Tilang dan JTO (Jembatan Timbang Online) yang diterapkan baru di UPPKB Wanareja Cilacap dan UPPKB Subah Batang saja, Terjadi kemunduran jadwal dari penerapan pembangunan SIM di UPPKB Klepu dan UPPKB Sarang Rembang yang pada awal tahun 2019 diharuskan untuk sudah menerpakan E-tilang dan JTO.

2. Dampak Kebijakan Penarikan Kewenangan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Terhadap Unit-Unit Sosial Terdampak

Dampak kebijakan penarikan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada akhirnya dapat dilihat pada:

a). Dampak Individual Pelaksana

Dampak individual yang dihasilkan adalah tempat kerja yang jauh dengan domisili dari para personil pelaksana, adanya penurunan gaji dan pangkat dari personil pelaksana, akan tetapi dampak negatif yang ada tidak mempengaruhi semangat kerja personil pelaksana

b). Dampak Organisasional

Dampak Organisasional yang dihasilkan adalah ada SOTK baru yang terbentuk sehingga menjanjikan sebuah harapan baru untuk peningkatan pelayanan UPPKB menjadi lebih baik, akan tetapi terdapat kerusakan alat sarana dan prasarana pada UPPKB yang masih tutup

c). Dampak pada kelompok sasaran dan sistem norma sosial

Dampak pada kelompok sasaran dan sistem norma sosial yang dihasilkan yaitu belum optimal karena masih sering terjadi konflik di lapangan antara petugas dan pengemudi angkutan muatan, serta Tingkat kesadaran sasaran kebijakan untuk tertib peraturan belum terbentuk karena belum diterapkannya mekanisme sanksi yang tegas yaitu dalam hal penurunan barang.

B. SARAN

Untuk dapat mengatasi beberapa kendala pada kondisi kapasitas sumber-sumber kebijakan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penimbangan

kendaraan bermotor di Wilayah Jawa Tengah, berikut saran dari peneliti:

- a). Terkait keterbatasan kuantitas atau jumlah personil pelaksana, Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dapat mengadakan rekrutmen pegawai dalam jangka waktu dekat ini.
- b). Sanksi yang diperlukan untuk tindakan pelanggaran berat seharusnya adalah pemecatan atau pencopotan status pegawai.
- c). Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan diharapkan untuk mengkaji ulang beberapa SOP yang diterapkan.
- d). Memperbanyak dan mempercepat proses revitalisasi pada UPPKB yang masih belum beroperasi
- e). Mengkaji ulang penentuan lokasi serta kapasitas luas area wilayah UPPKB.
- f). Kementerian Perhubungan diharapkan untuk segera melengkapi dan merealisasikan peningkatan pembangunan SIM (Sistem Informasi

Manajemen) pada tiga UPPKB Wilayah Jawa Tengah yang beroperasi kembali pada awal tahun 2019 ini.

Terkait tentang dampak yang dihasilkan dari adanya kebijakan penarikan kewenangan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Jawa Tengah, maka masukan dari peneliti adalah:

- a). Kementerian Perhubungan perlu memperhatikan kembali tentang proses penataan personil
- b). Kementerian Perhubungan perlu memperhatikan kesejahteraan para PPNN penjaga asset dari UPPKB yang masih belum beroperasi.
- c). Memperhatikan penjagaan dan perawatan kondisi fasilitas sarana dan prasarana di UPPKB yang belum beroperasi
- d). Kementerian Perhubungan diharapkan untuk lebih memperhatikan aspirasi dari kelompok sasaran kebijakan serta lebih meningkatkan upaya untuk memberikan edukasi kepada para kelompok sasaran

kebijakan melalui pendekatan secara pelan-pelan dan bertahap.

RUJUKAN

- Anggara, Sahya. 2012. *Perbandingan Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- A.S, Moenir. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoko, Hani. 2011. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama
- Indiahono ,Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Indroharto.1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapa
- Keban. Yeremia T. 2004. *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sukidin, Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Caps
- An-Naf, Julissar. Memahami Beberapa Potensi Masalah Dalam Proses Otonomi Daerah. E-jurnal Fisip:Madani. Vol 3, No 01(2006). Diakses pada tanggal 27 November 2017
- Purwanto, Agus Erwan. Pembagian Kewenangan Dalam Pelayanan Publik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. 2006:JKAP Volume 10 Nomor 2, Tahun 2006. Diakses pada tanggal 3 November 2017

- Satija. Mengurai Konflik Desentralisasi di Indonesia Arogansi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat. E-Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. 2003: JKAP Volume 7 Nomor 2, Tahun 2003. Diakses pada tanggal 4 November 2017
- Siregar, Antoni Juan. Implementasi Perda No.7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih (Studi Kasus Resiko Kerusakan Jalan Nasional dan Provinsi di Kota Pekanbaru). E-jurnal Fisip Volume 1 Nomor 2, Oktober 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan
- Permenhub Nomor 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Perpres Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.3723/AJ.005/DRJD/2018 Tentang Road Map Revitalisasi Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2024,
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 Tentang Kompetensi Petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor,
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2342/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

